

SUB TEMA:
MANAJEMEN DAN EKONOMI

ANALISIS DAYA SAING DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN WILAYAH DI JAWA TENGAH

Daryono Soebagyo

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta-57102
email: daryono51@ymail.com*

Abstract

Competitiveness of the region into one of the issues in regional development policy since the enactment of regional autonomy. Measurement of regional competitiveness has been mostly done through ranking as a benchmark the competitiveness of the region. Mapping regional competitiveness in Indonesia has been made to all counties and cities, which shows the competitiveness ranking of each region. Competitiveness ranking is based on the characteristics of the area assessed the competitiveness of the input and output competitiveness. Even though the mapping of regional competitiveness in Central Java in particular has never been done, but the result of the national and regional competitiveness can be used as a reference to determine the ranking of each district / town in Central Java. Distribution competitiveness ranking the 15 districts / cities in Central Java can be grouped based on input competitiveness and the competitiveness of output.

Keywords: *regional competitiveness, input - output, regional productivity - efficiency*

A. PENDAHULUAN

PPSK Bank Indonesia dan LP3E Unpad (2008) telah melakukan kajian pengukuran indeks daya saing daerah terhadap 434 kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan kerangka piramida, yang terdiri dari interaksi antara faktor *input-output-outcome*. Hasil pemetaan tersebut telah menghasilkan posisi dan peringkat daya saing dari masing-masing kabupaten/kota. Sementara itu, neraca daya saing daerah menggambarkan faktor-faktor yang menjadi keunggulan dan keterbatasan dalam rangka meningkatkan daya saing daerahnya.

Hasil pemetaan daya saing daerah secara keseluruhan menunjukkan bahwa daerah yang memiliki daya saing yang tinggi secara umum didominasi oleh Kabupaten/Kota yang memiliki basis ekonomi yang bersumber pada kekayaan sumber daya alam dan/atau daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis sektor industri dan sektor jasa. Sedangkan daerah kabupaten/kota yang memiliki daya saing daerah terendah, umumnya daerah dengan basis ekonomi yang bersandar pada sektor primer, khususnya pertanian (PPSK Bank Indonesia dan LP3E Unpad, 2008).

Kondisi daya saing daerah di Jawa Tengah berdasarkan hasil pemetaan daya saing kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan daya saing antar daerah. Kawasan perkotaan yang memiliki sumber daya alam terbatas namun sektor industri dan sektor jasa berkembang dengan baik, mempunyai tingkat daya saing yang baik sekali seperti Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Purwokerto dan Kota Salatiga dan Kota Magelang. Selama ini seringkali terjadi dikotomi antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Ada anggapan bahwa kawasan perkotaan tingkat produktivitas ekonominya lebih tinggi dibandingkan kawasan perdesaan. Ini akibat akumulasi investasi pembangunan lebih mengutamakan kawasan perkotaan dibandingkan kawasan perdesaan, atau sering diistilahkan dengan *urban bias*. Perdesaan secara politis, sosial dan ekonomi cenderung memiliki posisi melayani atau membantu perkotaan (Rustiadi, et al, 2009). Tingginya daya saing Kota Surakarta dibandingkan Kota Kabupaten Sukoharjo dan Kota Kabupaten Klaten bisa jadi karena Kota Surakarta bersifat urban sebagai wilayah inti (*core region*), sedangkan Kota Kabupaten Sukoharjo dan Klaten yang berada di peripheri Kota Surakarta merupakan semiurban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan daya saing daerah dan produktivitas daerah di Jawa Tengah. Secara khusus penelitian mempunyai tujuan: 1) Mengidentifikasi variabel-variabel dan indikator yang mempengaruhi keunggulan daya saing daerah, 2) Menemukan variabel-variabel yang dapat mendorong terjadinya peningkatan keunggulan dan produktivitas daya saing daerah secara berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kemampuan pembangunan daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan Daya Saing Daerah di Jawa Tengah

Hasil studi KPPOD (2005) menemukan bahwa indeks daya saing investasi daerah kota memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah kabupaten, akibat adanya fenomena aglomerasi atau klustering daya saing investasi berdasarkan kecenderungan daerah perkotaan atau dekat dengan kota lebih baik daya saingnya dibandingkan daerah kabupaten yang jaraknya jauh dari daerah kota (PPSK Bank Indonesia – LP3E FE UNPAD, 2008).

Berbagai ukuran daya saing regional dan kota diciptakan, salah satu diantaranya melalui pemeringkatan daerah, untuk memberikan deskripsi mengenai kinerja daya saing regional dan kota. Bagaimanapun fokus daya saing tidak hanya terbatas sebagai fenomena

makro ekonomi, melainkan juga mempunyai kepentingan utamanya pada skala regional, kota dan lokal

Perspektif Ekonomi Regional tentang Daya Saing Daerah dan Implikasinya

Setiap kebijakan pembangunan daerah senantiasa ditujukan pada peningkatan daya saing daerah yang dilakukan pada berbagai tingkatan pemerintahan. Daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam bawaan (*resources endowment*) yang berlimpah, mempunyai kecenderungan menggunakan teori keunggulan komparatif mengikuti pendekatan Ricardian (1817), yang mendorong terjadinya spesialisasi daerah dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi (Tsoulfidis, 2010). Teori pertumbuhan neoklasik menekankan pada pentingnya keunggulan komparatif, di mana perbedaan secara regional dalam produktivitas sehubungan dengan berbedanya faktor-faktor anugerah bawaan (*endowment*), dan khususnya perbedaan dalam hal kapital, tenaga kerja dan teknologi.

Perhatian terhadap peningkatan daya saing daerah menjadi penting, mengingat bahwa daya saing daerah yang tinggi mempunyai implikasi terhadap penguatan produktivitas daerah. Daya saing daerah bersifat dinamis, artinya dapat mengalami peningkatan atau penurunan tergantung pada kemampuan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah itu sendiri. Pada dasarnya pemerintah daerah dapat memberikan pengaruh terhadap keunggulan daya saing daerah melalui kebijakan publik, penentuan standar produk lokal, menciptakan regulasi yang mendorong pertumbuhan industri-industri terkait dan pendukungnya di dalam suatu wilayah, serta kebijakan fiskal daerah (Daryanto dan Hafizrianda, 2010).

Kerangka Model Penelitian

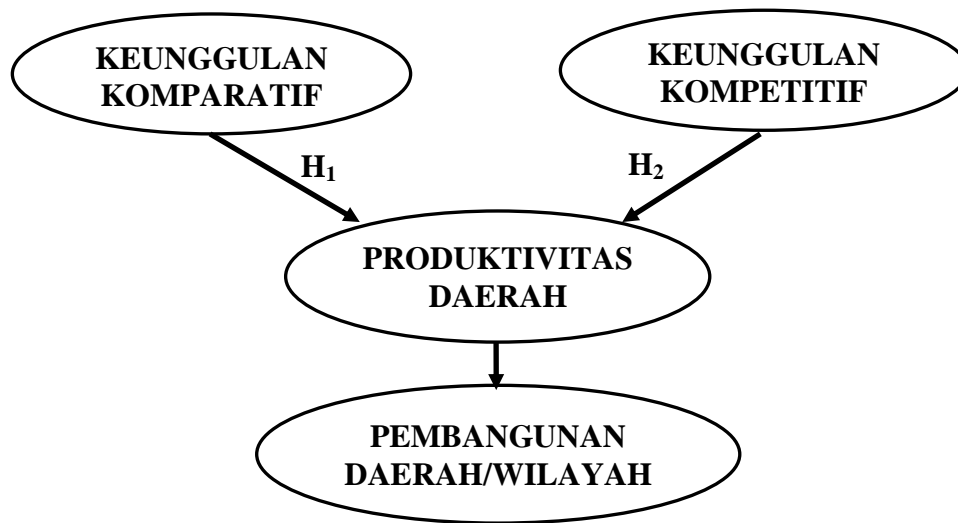
Hubungan antara variabel didasarkan pada suatu konsep yang dibangun berdasarkan landasan teori tertentu. Berdasarkan hubungan antar variabel atau konstruk dan sifat pembentukannya serta sesuai dengan kerangka konseptual dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka variabel utama yang diteliti terkait dengan keunggulan komparatif, dan keunggulan kompetitif sebagai pembentuk daya saing daerah, serta produktivitas daerah, dan pembangunan wilayah sebagai dampak dari daya saing daerah.

Beberapa hubungan dan pengaruh antar variabel yang secara hipotetis akan diteliti meliputi:

H₁ : Hubungan dan pengaruh keunggulan komparatif terhadap produktivitas daerah.

H₂ : Hubungan dan pengaruh keunggulan kompetitif terhadap produktivitas daerah.

Secara hipotetis model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan:



GAMBAR 1 MODEL PENELITIAN

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu menganalisis daya saing daerah dengan menguji hubungan pengaruh antara keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, produktivitas daerah, dan pembangunan wilayah, maka rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan melakukan eksplorasi berdasarkan fakta-fakta empiris yang terdapat di wilayah penelitian dan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif.

Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi dan obyek penelitian ini mengambil studi kasus pengamatan di daerah/wilayah Jawa Tengah, yang meliputi 15 daerah kabupaten/kota. Daerah/Wilayah Jawa Tengah ditetapkan menjadi obyek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah/wilayah ini sebagai satu entitas regional yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah/wilayah yang relatif tinggi, meskipun terdapat kesenjangan daya saing antar daerah yang besar.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel yang diteliti merupakan variabel yang terdiri dari variabel keunggulan komparatif (X_1), variabel keunggulan kompetitif (X_2), variabel produktivitas daerah (Y_1), dan variabel pembangunan daerah/wilayah (Y_2). Masing-masing variabel tersebut dijabarkan ke

dalam indikator-indikator yang lebih operasional untuk pengukurannya. Penjabaran masing-masing variabel tersebut adalah:

1. Variabel keunggulan komparatif (X_1), dijabarkan dan diukur dalam beberapa indikator, yaitu:
 - a. $X_{1.1}$ LQ sektor primer yaitu jumlah tenaga kerja di sektor primer (ekstraktif) dibagi tenaga kerja total sektor di kabupaten/kota dibandingkan jumlah tenaga kerja di sektor primer (ekstraktif) dibagi tenaga kerja total sektor di wilayah propinsi,
 - b. $X_{1.2}$ LQ sektor sekunder yaitu jumlah tenaga kerja di sektor sekunder (manufaktur) dibagi tenaga kerja total sektor di kabupaten/kota dibandingkan jumlah tenaga kerja di sektor sekunder (manufaktur) dibagi tenaga kerja total sektor di wilayah propinsi,
 - c. $X_{1.3}$ LQ sektor tersier yaitu jumlah tenaga kerja di sektor tersier (perdagangan dan jasa) dibagi tenaga kerja total sektor di kabupaten/kota dibandingkan jumlah tenaga kerja di sektor tersier (perdagangan dan jasa) dibagi tenaga kerja total sektor di wilayah propinsi,
 - d. $X_{1.4}$ indeks spesialisasi regional yaitu untuk melihat tinggi rendahnya tingkat spesialisasi suatu daerah terhadap daerah lainnya berdasarkan nilai PDRB sektor tertentu dan total PDRB,
 - e. $X_{1.5}$ kepadatan penduduk yaitu jumlah penduduk dibagi luas wilayah,
 - f. $X_{1.6}$ jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk dalam usia kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari kerja.
 - g. $X_{1.7}$ persentase penduduk dengan pendidikan terendah tamat SMA sederajat yaitu jumlah penduduk dengan pendidikan terendah tamat SMA sederajat dibagi total penduduk.
2. Variabel keunggulan kompetitif (X_2), dijabarkan dan diukur dalam beberapa indikator, yaitu:
 - a. $X_{2.1}$ tingkat aglomerasi diukur menggunakan indeks Hirschman-Herfindahl,
 - b. $X_{2.2}$ investasi publik yaitu jumlah belanja pelayanan publik per kapita,
 - c. $X_{2.3}$ *government size* yaitu total pengeluaran pemerintah daerah dibagi nilai PDRB,
 - d. $X_{2.4}$ persentase penduduk yang tamat pendidikan di Perguruan Tinggi yaitu jumlah penduduk lulusan perguruan tinggi dibagi total penduduk,
 - e. $X_{2.5}$ rasio pelayanan jaringan jalan yaitu panjang jalan dibagi jumlah penduduk,
 - f. $X_{2.6}$ kualitas pelayanan jaringan jalan yaitu persentase panjang jalan dengan kondisi baik.
3. Variabel produktivitas daerah (Y_1), dijabarkan dalam beberapa indikator, yaitu:
 - a. $Y_{1.1}$ produktivitas sektor primer (ekstraktif) yaitu nilai PDRB sektor primer (ekstraktif) dibagi tenaga kerja di sektor primer (ekstraktif),

- b. $Y_{1.2}$ produktivitas sektor sekunder (manufaktur) yaitu nilai PDRB sektor sekunder (manufaktur) dibagi tenaga kerja di sektor sekunder (manufaktur),
- c. $Y_{1.3}$ produktivitas sektor tersier (perdagangan dan jasa) yaitu nilai PDRB sektor tersier (perdagangan dan jasa) dibagi tenaga kerja di sektor tersier (perdagangan dan jasa),
- d. $Y_{1.4}$ produktivitas tenaga kerja yaitu nilai PDRB dibagi total tenaga kerja,
4. Variabel pembangunan daerah/wilayah (Y_2), dijabarkan dalam beberapa indikator, yaitu:
 - a. $Y_{2.1}$ pertumbuhan ekonomi, yaitu besarnya pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah
 - b. $Y_{2.2}$ pendapatan per kapita yaitu nilai PDRB dibagi jumlah penduduk,
 - c. $Y_{2.3}$ indeks pembangunan manusia yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup di setiap kabupaten/ kota.
 - d. $Y_{2.4}$ indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) yaitu merupakan ukuran perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai proporsi dari garis kemiskinan tersebut,
 - e. $Y_{2.5}$ angka harapan hidup (AHH) yaitu rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu.
 - f. $Y_{2.6}$ tingkat pengangguran yaitu jumlah penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja.

Tehnik Pengukuran Variabel

Setiap variabel penelitian dijabarkan ke dalam indikator-indikator tertentu yang dalam penelitian ini diukur menggunakan skala ordinal atau rasio. Setiap indikator terkandung data-data dan informasi yang menggunakan besaran skala ordinal atau rasio. Dalam penyajian data dan analisis data disesuaikan dengan skala pengukuran tersebut. Setiap data asli yang terdapat pada masing-masing indikator mempunyai ukuran/satuan yang berbeda-beda, sehingga data-data asli perlu dilakukan standarisasi.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada penggunaan data sekunder, sedangkan data primer bersifat melengkapi data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data-data statistik, publikasi, dan dokumen-dokumen yang terdapat di berbagai lembaga dan instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Data sekunder yang dikumpulkan adalah data panel yang informasinya mencakup 15 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2006 sampai dengan 2009. Pemilihan rentang waktu tersebut adalah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

Teknik Analisis Data

Setelah tahapan pengumpulan data, dilanjutkan dengan melakukan analisis data. Sekumpulan data yang ada dianalisis menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan metode analisis statistik inferensial.

Metode Analisis Statistik Deskriptif

Metode analisis statistik deskriptif dilakukan dengan memberikan gambaran secara lengkap terhadap variabel-variabel yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dan membantu dalam memberikan gambaran nyata tentang kondisi masing-masing variabel. Data-data yang telah ditabulasikan dan dikompilasi yang dikelompokkan menurut variabel masing-masing disajikan dalam bentuk hasil perhitungan *mean*, standard deviasi, nilai minimum dan maksimum.

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi otonomi daerah yang luas sejak tahun 2001 perlu disikapi dengan cepat oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Kewenanganyang lebih luas dalam desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut aspek-aspek administrasi, kelembagaan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan harus segera direalisasikan termasuk pengelolaan sumber penerimaan dan pengeluaran daerah.

Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Jawa Tengah 2003–2008, disebutkan bahwa untuk menjadikan Jawa Tengah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, berkelanjutan, menjadi pilar pembangunan nasional yang dilandasi oleh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, disusun pentahapan pelaksanaan pembangunan Propinsi Jawa Tengah tahun 2004 – 2008, sebagai berikut:

1. Tahap Penguatan Kemandirian (2004 – 2005).
2. Tahap Peningkatan Daya Saing (2006 – 2007).
3. Tahap Pengembangan Kemandirian, Daya Saing dan Eksistensi

Daya saing daerah menjadi salah satu isu dalam pembangunan daerah semenjak berlakunya kebijakan otonomi daerah. Pengukuran daya saing daerah selama ini banyak dilakukan melalui pemeringkatan sebagai *benchmark* daya saing daerah. Pemetaan daya saing daerah di Indonesia telah dilakukan terhadap semua kabupaten dan kota, yang menunjukkan peringkat daya saing masing-masing daerah. Peringkat daya saing daerah dinilai berdasarkan karakteristik daya saing input dan daya saing outputnya.

Meskipun pemetaan daya saing daerah di Jawa Tengah secara khusus belum pernah dilakukan, namun hasil pemeringkatan daya saing daerah secara nasional dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui peringkat masing-masing daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil sampel 15 daerah yang memiliki karakteristik hampir sama namun mempunyai potensi berbeda sehingga memunculkan daya saing tersendiri antar daerah tersebut. Daerah penelitian meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Salatiga, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pekalongan.

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan indikator masing-masing variabel, pembahasan variabel penelitian dapat dijelaskan melalui statistik distriptif data penelitian. Empat variabel laten (konstruk) yang dalam penelitian ini yang didiskripsikan, yaitu: variabel keunggulan komparatif, variabel keunggulan kompetitif, variabel produktivitas daerah, dan variabel pembangunan wilayah yang dimulai dari tahun 2006-2010.

Variabel keunggulan komparatif dijelaskan melalui tujuh indikator, yaitu LQ sektor primer, LQ sektor sekunder, LQ sektor tersier, indeks spesialisasi, kepadatan penduduk, angkatan kerja dan penduduk tamat SMA. Indikator LQ berdasarkan sektor untuk mengetahui basis ekonomi yang menjadi kekuatan masing-masing daerah.

LQ sektor primer memberikan gambaran tentang kekuatan daerah dalam membangun sektor primer (sektor pertanian, dan sektor penggalian dan pertambangan) sebagai basis ekspor daerah. Tahun 2006 nilai LQ sektor primer yang tertinggi adalah Kabupaten Purworejo (9,346) sedangkan terendah Kabupaten Wonogiri (0,234). Dari sampel penelitian sebanyak 15 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, daerah yang mempunyai nilai $LQ > 1$ sebanyak 10 daerah Kabupaten/Kota, yang berarti mempunyai keunggulan di sektor primer. Sementara itu, 5 daerah Kabupaten/Kota yaitu mempunyai nilai $LQ < 1$, yang berarti tidak mempunyai keunggulan di sektor primer.

Rendahnya nilai LQ sektor primer di Kota Surakarta dan kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah menunjukkan sektor primer bukan menjadi sektor andalan basis ekspor pada daerah tersebut. Dari nilai rata-rata (*mean*) LQ sektor primer sebesar 2,448 menunjukkan adanya kecenderungan daerah-daerah di Jawa Tengah mempunyai keunggulan

di sektor primer, artinya peranan keunggulan sumber daya alam cukup besar dalam pembangunan wilayah.

Pada tahun 2007 nilai LQ sektor primer yang tertinggi adalah Kabupaten Kebumen (7,816) kemudian urutan kedua Kabupaten Karanganyar (4,973), sedangkan terendah Kabupaten Magelang (0,041) dan Kabupaten Sukoharjo (0,252). Daerah yang mempunyai nilai LQ > 1 pada tahun 2007 sebanyak 8 daerah Kabupaten/Kota, yang berarti mempunyai keunggulan di sektor primer dan 7 daerah kabupaten/Kota lainnya yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Salatiga dan Kota Semarang nilai LQ < 1, yang berarti tidak mempunyai keunggulan di sektor primer.

Rendahnya nilai LQ sektor primer di Kota Surakarta dan kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah menunjukkan sektor primer bukan menjadi sektor andalan basis ekspor pada daerah tersebut. Dari nilai rata-rata (*mean*) LQ sektor primer sebesar 2,150 menunjukkan adanya kecenderungan daerah-daerah di Jawa Tengah mempunyai keunggulan di sektor primer, artinya peranan keunggulan sumber daya alam cukup besar dalam pembangunan wilayah.

Pada tahun 2008 nilai LQ sektor primer yang tertinggi adalah Kabupaten Magelang (13,167) dan Kabupaten Kebumen (5,185) sedangkan nilai LQ sektor primer terendah yaitu Kabupaten Pekalongan (0,359) dan Kabupaten Boyolali (0,364). Dari sampel penelitian sebanyak 15 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, daerah yang mempunyai nilai LQ > 1 sebanyak 10 daerah Kabupaten/Kota, yang berarti mempunyai keunggulan di sektor primer. Sementara itu, 5 daerah kabupaten/Kota mempunyai nilai LQ < 1, yang berarti tidak mempunyai keunggulan di sektor primer.

Rendahnya nilai LQ sektor primer di Kota Surakarta dan kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah menunjukkan sektor primer bukan menjadi sektor andalan basis ekspor pada daerah tersebut. Dari nilai rata-rata (*mean*) LQ sektor primer sebesar 3,157 menunjukkan adanya kecenderungan daerah-daerah di Jawa Tengah mempunyai keunggulan di sektor primer, artinya peranan keunggulan sumber daya alam cukup besar dalam pembangunan wilayah. Tahun 2009 nilai LQ sektor primer yang tertinggi adalah Kabupaten Magelang (7,391) dan Kabupaten Kebumen (4,800), sedangkan terendah Kota Semarang (0,151) dan Kabupaten Semarang (0,209). Pada tahun ini daerah yang mempunyai LQ>1 mengalami penurunan dibanding tahun 2010, tahun 2009 sebanyak 8 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, daerah yang mempunyai nilai LQ >1, yang berarti mempunyai keunggulan di sektor primer. Sementara itu, 7 daerah kabupaten/Kota yaitu Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta,

Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Pekalongan mempunyai nilai $LQ < 1$, yang berarti tidak mempunyai keunggulan di sektor primer.

Rendahnya nilai LQ sektor primer tahun 2009 di Kota Surakarta dan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah menunjukkan sektor primer bukan menjadi sektor andalan basis ekspor pada daerah tersebut. Dari nilai rata-rata (mean) LQ sektor primer sebesar 2,313 menunjukkan adanya kecenderungan daerah-daerah di Jawa Tengah mempunyai keunggulan di sektor primer, artinya peranan keunggulan sumber daya alam cukup besar dalam pembangunan wilayah.

Pada tahun 2010 nilai LQ sektor primer yang tertinggi adalah Kabupaten Kebumen (5,952) dan Kabupaten Wonogiri (5,703), sedangkan terendah Kota Surakarta (0,471) dan Kota Purworejo (0,661). Dari sampel penelitian sebanyak 15 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, daerah yang mempunyai nilai $LQ > 1$ sebanyak 10 daerah Kabupaten/Kota, yang berarti mempunyai keunggulan di sektor primer. Sementara itu, 5 daerah Kabupaten/Kota yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang mempunyai nilai $LQ < 1$, yang berarti tidak mempunyai keunggulan di sektor primer.

Rendahnya nilai LQ sektor primer di Kota Surakarta dan kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah tahun 2010 menunjukkan sektor primer bukan menjadi sektor andalan basis ekspor pada daerah tersebut. Dari nilai rata-rata (mean) LQ sektor primer sebesar 2,469 menunjukkan adanya kecenderungan daerah-daerah di Jawa Tengah mempunyai keunggulan di sektor primer, artinya peranan keunggulan sumber daya alam cukup besar dalam pembangunan wilayah.

TABEL 1 DISKRIPSI VARIABEL KEUNGGULAN KOMPARATIF

Tahun 2006-2010					
Var	Indikator	Max	Min	Mean	StdEv
X11	LQ Sektor Primer	13,166	0,040	2,507	2,436
X12	LQ Sektor Sekunder	13,166	0,173	2,758	1,895
X13	LQ Sektor Tersier	48,439	0,442	3,368	5,368
X14	Indeks Spesialisasi	67,238	2,803	20,953	16,676
X15	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	119,96	5,097	27,909	30,871
X16	Angkatan Kerja (%)	85710	5,766	18904,22	19525,10
X17	Penduduk Tamat SMA (%)	0,049506	0,001028	0,0128	0,0116

Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Perhitungan, 2006-2010

LQ sektor sekunder memberikan gambaran tentang keunggulan daerah dalam membangun sektor sekunder (sektor industri pengolahan) sebagai basis ekspor daerah. Nilai LQ sektor sekunder tahun 2006 yang tertinggi adalah Kota Pekalongan (5,021), dan

terendah Kabupaten Sukoharjo (0,421). Sedangkan pada tahun 2007 Nilai LQ sekunder tertinggi adalah kabupaten Pekalongan (5,701) dan terendah Kabupaten Magelang (0,174). Di tahun 2008, Kabupaten Pekalongan tidak lagi memiliki LQ tertinggi karena pada saat ini Kabupaten Magelang menggantikan posisi tersebut dengan LQ sekunder 13,167 dan terendah justru Kabupaten Pekalongan memiliki LQ sekunder terendah yaitu 0,359. Pada tahun 2009 Kabupaten Pekalongan kembali mempunyai nilai LQ tertinggi yaitu sebesar 5,841 dan terendah Kota Semarang dengan LQ sekunder 0,343. Tahun 2010 nilai LQ sekunder tertinggi adalah Kabupaten Kebumen dengan nilai LQ sekunder sebesar 5,952 dan terendah Kota Surakarta dengan LQ sekunder sebesar 0,471. Kota Pekalongan mempunyai nilai LQ sektor sekunder tertinggi yang secara dominan tidak lepas dari dukungan industri batik yang terkenal dan besar. Kabupaten Magelang mempunyai sektor industri pangan yang secara geografis diuntungkan karena sektor pariwisata serta dekat dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.. Hanya ada beberapa saja yang nilai LQ nya < 1 (Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2006, kabupaten Magelang pada tahun 2007 dan di tahun 2010 adalah Kota Surakarta). Rendahnya nilai LQ sektor sekunder Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo pada tahun tertentu menunjukkan sektor sekunder (sektor industri pengolahan) ternyata belum merupakan andalan basis.

Nilai LQ secara rata-rata (*mean*) sektor sekunder di Jawa Tengah sebesar 2,759 yang memberikan indikasi bahwa peran sektor sekunder masih tinggi di sementara daerah ini, terbukti dari tahun 2006 – 2010 rata-rata dari 15 daerah yang diteliti lebih dari 8 daerah mempunyai LQ sekunder > 1 .

LQ sektor tersier memberikan gambaran tentang keunggulan daerah dalam membangun sektor tersier (sektor infrastruktur, perdagangan, keuangan, dan jasa-jasa) sebagai basis ekspor daerah. Nilai LQ sektor tersier yang tertinggi pada tahun 2006 Magelang (4,985), Kota Surakarta (4,613), sedangkan terendah Kabupaten Wonogiri (1,768) dan Kabupaten Boyolali (1,985). Di tahun ini Kabupaten/Kota umumnya mempunyai keunggulan di sektor tersier, 15 daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel mempunyai nilai LQ > 1 , berarti daerah tersebut mempunyai keunggulan di sektor jasa. Nilai LQ rata-rata (*mean*) sektor tersier di Jawa Tengah sebesar 3,369 yang memberikan indikasi bahwa keunggulan sektor tersier cukup tinggi dibandingkan sektor sekunder.

Variabel selanjutnya adalah Indeks spesialisasi, variabel ini mengindikasikan derajat spesialisasi yang terjadi di daerah. Nilai indeks spesialisasi tertinggi pada tahun 2006 terdapat di Kabupaten Salatiga (64,068), Kabupaten Magelang (53,569), sedangkan terendah di Kota Semarang (2,814) dan Kabupaten Semarang (10,358). Pada tahun 2007 sampai 2010

daerah dengan nilai indeks spesialisasi tertinggi masih berada di Kabupaten Salatiga dan Magelang sedang terendah juga Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, namun demikian dari diskripsi data yang ada 15 daerah Kabupaten/Kota mempunyai kecenderungan spesialisasi, di nilai indeks spesialisasinya lebih besar dari 0,50. Nilai indeks rata-rata di Jawa Tengah sebesar 20,953 memberikan indikasi masih belum terbentuknya spesialisasi yang kuat pada daerah-daerah yang di teliti di Jawa Tengah. Kepadatan penduduk memberikan gambaran sebaran dan konsentrasi penduduk yang ada di daerah, dan umumnya daerah perkotaan mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Tahun 2006, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Surakarta (116,48 jiwa/km²), Kabupaten Magelang (71.717 jiwa/km²), sedangkan kepadatan terendah di Kabupaten Wonogiri (5.371 jiwa/km²) dan Kabupaten Purworejo (6.932 jiwa/km²). Pada tahun 2007 – 2010 kepadatan penduduk masih di dominasi oleh Kabupaten Surakarta (113.408 jiwa/km²) dan Kabupaten Magelang (65.246 jiwa/km²), angka tersebut menurun dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Penduduk yang berada di daerah kota secara geografis lebih terkonsentrasi, sedangkan di daerah kabupaten distribusi penduduknya lebih tersebar. Secara spasial menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk yang tinggi secara geografis menunjukkan daerah perkotaan, sedangkan konsentrasi penduduk yang rendah menggambarkan daerah bukan perkotaan. Perbedaan dalam hal distribusi kepadatan penduduk ini akan berpengaruh terhadap efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

Variabel angkatan kerja mengindikasikan besarnya penduduk usia produktif yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2006, daerah yang mempunyai persentase angkatan kerja tertinggi adalah Kota Semarang (68,81%) dan Kabupaten Kebumen (53,03%) sedangkan yang terendah di Kabupaten Magelang (5,76%) dan Kota Salatiga (11,01%). Pada tahun 2007, Kota Semarang masih mempunyai angka persentase angkatan kerja yang tertinggi yaitu 85,25% dan Kabupaten Klaten sebesar 52,11%, sedangkan terendah Kabupaten Salatiga dengan persentase angkatan kerja sebesar 9,83% serta Kabupaten Magelang sebesar 13,40%. Sementara itu, Pada tahun 2008 Kota Semarang, Kabupaten Klaten masih memiliki nilai yang tertinggi, dan pada tahun 2009-2010 tertinggi adalah Kota Semarang dan Kabupaten Kebumen, untuk terendah masih Kabupaten Magelang dan Kabupaten Salatiga sampai tahun 2010. Persentase angkatan kerja rata-rata di daerah Jawa Tengah adalah 30,62%. Daerah-daerah yang mempunyai persentase angkatan kerja

tinggi mempunyai potensi besar dalam penyediaan tenaga kerja untuk mendukung sektor produksi di daerah. Indikator komparatif terakhir adalah penduduk yang tamat pendidikan SMA. Berdasarkan persentasenya yang tertinggi pada tahun 2006 adalah Kabupaten Kendal (3,37%) dan Kabupaten Semarang (3,35%), sedangkan terendah Kabupaten Salatiga (0,35%), dan Kabupaten Pekalongan (0,24%). Pada tahun 2007-2010 kedua daerah tersebut masih memiliki persentase angkatan kerja yang tertinggi. Sedangkan persentase rata-rata penduduk tamat pendidikan SMA di Jawa Tengah adalah 1,3%. Daerah kota secara umum mempunyai persentase penduduk tamat SMA lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten. Hal ini memberikan indikasi bahwa penduduk yang terdidik dengan pendidikan SMA atau yang setara di daerah Kota persentasenya lebih banyak. Potensi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang tamat SMA di daerah Kota relatif lebih tinggi dibandingkan daerah Kabupaten.

Variabel keunggulan kompetitif dijelaskan melalui enam indikator, yaitu indeks aglomerasi, investasi publik, *government size*, penduduk tamat perguruan tinggi, rasio panjang jalan terhadap penduduk, dan kualitas jaringan jalan.

Indeks aglomerasi mengindikasikan besarnya kekuatan aglomerasi yang terjadi di setiap daerah. Pengukuran indeks aglomerasi menggunakan metode Hirschman-Herfindahl. Nilai indeks aglomerasi tertinggi dari tahun 2006 -2010 pada 15 daerah di Jawa tengah terdapat di Kota Semarang (0,136), dan Kabupaten Semarang (0,036), di mana pada daerah tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi pada sektor tertentu yang sangat dominan. Kekuatan aglomerasi yang tinggi di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang akibat pengaruh terkonsentrasinya sektor tersier di daerah tersebut sehingga pengaruh sektor-sektor lainnya khususnya sektor primer menjadi tidak signifikan lagi. Sedangkan terendah di Kabupaten Salatiga (0,0058 dan Kabupaten Magelang (0,007), di mana kegiatan ekonomi yang ada tidak menunjukkan kecenderungan terjadinya aglomerasi dan peran sektor-sektor yang ada belum nampak adanya konsentrasi ke arah kegiatan ekonomi tertentu. Meskipun demikian kedua kabupaten tersebut mempunyai kekuatan di sektor sekunder, tetapi pengaruh sektor-sektor lainnya masih cukup kuat sehingga belum menunjukkan kecenderungan terjadinya aglomerasi yang cukup tinggi. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa 15 Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai kecenderungan membentuk aglomerasi sektoral, karena nilai indeks aglomerasinya kurang dari 0,50. Nilai indeks aglomerasi rata-rata di Jawa Tengah sebesar 0,0319 memberikan indikasi masih belum terbentuk kecenderungan aglomerasi yang kuat pada daerah-daerah di Jawa Tengah.

Investasi publik berkaitan dengan peranan pemerintah daerah dalam pembangunan yang diukur dari besarnya APBD per kapita. Pemerintah Daerah yang menyediakan investasi publik terbesar adalah Kota Semarang (Rp. 203.658.263,- per kapita) pada tahun 2010, dan Kabupaten Klaten (Rp. 104.429.315,6,- per kapita), sedangkan yang terkecil Kabupaten Salatiga (Rp. 41.861.591,- per kapita), dan Kabupaten Pekalongan (Rp. 42.071.865,- per kapita). Sementara itu nilai rata-rata investasi publik di Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 718.763.398,- per kapita. Ketiga kota tersebut diatas mempunyai jumlah penduduk yang relatif lebih kecil, sehingga investasi pemerintah yang diarahkan pada sektor publik juga secara relatif menjadi lebih tinggi. Dari perbandingan tersebut diatas terlihat bahwa investasi publik per kapita di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah kabupaten.

Ukuran *government size* berkaitan dengan besarnya rasio APBD terhadap nilai PDRB. Semakin besar nilai rasio *government size* menunjukkan bahwa dalam pembangunan daerah masih tingginya ketergantungan pada pemerintah daerah. Daerah yang mempunyai *government size* tertinggi dari tahun 2006 – 2010 adalah Kabupaten Magelang (690.336) terjadi pada tahun 2006 sedangkan untuk tahun 2010 Kabupaten Magelang berada pada urutan kedua setelah Salatiga dengan ukuran *government size* sebesar (458.496) sedangkan terkecil Kabupaten Salatiga (20.978) pada tahun 2009.

Indikator kompetitif selanjutnya adalah penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai peran yang besar sebagai agen pembangunan di daerah, khususnya dalam mendorong berkembangnya ekonomi berbasis pengetahuan. Penduduk yang tamat pendidikan perguruan tinggi berdasarkan persentasenya yang tertinggi adalah Kabupaten Semarang (32,91%) pada tahun 2009 kemudian pada tahun 2010 turun menjadi 20,38% namun masih yang tertinggi, sedangkan terendah Kabupaten Kebumen (0,02%) pada tahun 2006 dan naik pada tahun 2010 dengan prosentase (0,15%), namun masih merupakan daerah dengan persentase yang terendah. Persentase rata-rata penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi di daerah Jawa Tengah adalah 0,54%. Adanya konsentrasi perguruan tinggi di Kabupaten Semarang dapat mendorong terjadinya peningkatan lulusan perguruan tinggi di daerah perkotaan tersebut, sehingga secara kuantitas maupun kualitas penduduk yang berpendidikan tinggi juga lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya.

Ketersediaan jaringan jalan diukur dengan rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk. Daerah yang mempunyai rasio panjang jalan terhadap penduduk terbesar adalah Kabupaten Sukoharjo (0,00149 meter per penduduk) pada tahun 2006 sedangkan pada tahun 2010 dalam ketersediaan jaringan jalan mengalami penurunan menjadi 0,00148 namun masih

marupakn daerah yang ketersediaan jaringan jalan tertinggi. sedangkan terkecil Kabupaten Pekalongan (0,0004 meter per penduduk di tahun 2010. Sedangkan nilai rata-rata rasio panjang jalan di Jawa Tengah adalah 0,00080 meter per penduduk.

Indikator kualitas jaringan jalan menentukan kemudahan aksesibilitas di suatu daerah. Dari sisi kualitas jaringan jalan yang terbaik terdapat di Kota Semarang (1.636,56) pada tahun 2007, sedangkan terendah kualitas jalannya adalah Kabupaten Pekalongan 6,03. Sementara itu, kondisi kualitas jaringan jalan rata-rata di Jawa Tengah dari tahun 2006-2010 adalah 406,93. Kualitas jaringan jalan di daerah perkotaan relatif lebih baik dan terpelihara dibandingkan yang terdapat di daerah kabupaten.

TABEL 2 DISKRIPSI VARIABEL KEUNGGULAN KOMPETITIF

Var	Indikator	Min	Max	Mean	StanDev
X21	Indeks Aglomerasi	0,1368	0,0058	0,0317	0,029
X22	Investasi Publik (Rp/kapita)	2036582639,0	18239642	718763399	304881676,5
X23	Government Size	690,335	20,9783	217,320	109,809
X24	Penduduk Tamat PT (%)	0,3291	0,0117	0,05453	0,0592
X25	Rasio Panjang Jalan per Penduduk	0,00149	0,0004	0,0008	0,0003
X26	Kualitas Jaringan Jalan (%)	1636,56	6,03	406,937467	300,783

Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Perhitungan, 2006-2010.

Variabel produktivitas daerah dijelaskan melalui empat indikator, yaitu produktivitas sektor primer, produktivitas sektor sekunder, produktivitas sektor tersier, dan produktivitas tenaga kerja. Daerah yang mempunyai nilai tertinggi dari tahun 2006 – 2010 untuk produktivitas sektor primer adalah Kabupaten Magelang (Rp. 27.069,34 juta/TK) di tahun 2006, Kabupaten Pekalongan (Rp. 7.426,10 juta/TK), dan Kota Surakarta (Rp.7.111,439 juta/TK) sampai tahun 2010 ketiga daerah tersebut masih mempunyai produktivitas sektor primer yang tertinggi. Sedangkan nilai produktivitas sektor primer terendah diperoleh Kabupaten Magelang (Rp. 119,68 juta/TK) pada tahun 2009 namun pada tahun 2010 Kabupaten Magelang mempunyai nilai produktivitas sektor primer tertinggi yaitu Rp. 9.294,47 dan tersendah adalah Kabupaten Kebumen dengan nilai produktivitas sektor primer sebesar Rp. 230,34. Adapun nilai rata-rata produktivitas sektor primer di Jawa Tengah adalah Rp. 3.073,26 juta/TK, di mana hanya ada 8 daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tingkat produktivitas sektor primer di atas nilai rata-rata dan beberapa daerah lainnya mempunyai tingkat produktivitas sektor primer sangat rendah, hal ini tidak semata-mata akibat faktor tenaga kerja, melainkan juga dapat dipengaruhi faktor lain seperti tingkat kesuburan tanah untuk budidaya pertanian, ketersediaan pengairan.

Daerah yang mempunyai nilai tertinggi untuk produktivitas sektor sekunder adalah Kabupaten Magelang (Rp. 7.842,86 juta/TK) pada tahun 2008, sedangkan tahun 2010 turun menjadi 7.626.100 juta/TK, Kabupaten Salatiga (Rp.4.955,610 juta/TK), dan Kabupaten Wonogiri (Rp. 1.865,224 juta/TK), sedangkan nilai terendah diperoleh Kabupaten Klaten (Rp. 305,45 juta/TK) pada tahun 2006 dan tahun 2010 Kabupaten Klaten masih termasuk 3 daerah terendah yaitu Kota Semarang (Rp. 392,46 juta/TK), dan Kabupaten Semarang (Rp. 479,27 juta/TK) dan Kabupaten Klaten (Rp. 479,94 juta/TK). Nilai rata-rata produktivitas sektor sekunder di Jawa Tengah adalah Rp. 1.483,50 juta per TK. Sementara itu, nilai produktivitas sektor sekunder sangat bervariasi dilihat dari besarnya perbedaan antara nilai maksimum dan minimum yaitu berkisar antara Rp. 7.842,86 juta – Rp. 305,45 juta per TK dengan nilai standar deviasinya Rp. 1.726,76 juta per TK sektor sekunder.

Nilai produktivitas sektor tersier tahun 2006 – 2010 tertinggi dicapai oleh Kabupaten Magelang (Rp.1.625,35 juta/TK) pada tahun 2010, Kabupaten Salatiga (Rp.1.324,124 juta/TK), dan Kota Pekalongan (Rp.977,27 juta/TK), dan daerah yang mempunyai nilai terendah produktivitas sektor tersiernya adalah Kota Semarang (Rp. 134,28 juta/TK) pada tahun 2006, dan pada tahun 2010 Kota Semarang mengalami peningkatan (Rp. 139,19 juta/TK) Kabupaten Klaten (Rp. 240,55 juta/TK), dan Kabupaten Sragen (Rp. 345,03 juta/TK). Sementara itu, nilai rata-rata produktivitas sektor tersier di Jawa Tengah adalah Rp. 518,02 juta/TK, dan hanya ada 6 daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai produktivitas sektor tersier diatas nilai rata-rata. Nilai produktivitas tenaga kerja dari tahun 2006-2010 tertinggi diperoleh Kota Semarang (Rp.1.351 juta/TK) pada tahun 2010, sedangkan nilai terendahnya diperoleh Kabupaten Salatiga pada tahun 2006 (Rp.0,049 juta/TK), Sementara itu, nilai rata-rata produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah adalah Rp. 0,281 juta/TK, dan hanya ada 7 daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai produktivitas tenaga kerja diatas nilai rata-rata tersebut, selain Kota Semarang yang mempunyai nilai diatas rata-rata juga termasuk Kabupaten Semarang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten Tingginya nilai produktivitas tenaga kerja pada daerah Kota/Kabupaten tersebut diatas, tidak dapat dipisahkan dari peran produktivitas sektor sekunder dan tersier pada daerah-daerah tersebut, demikian pula sebaliknya untuk daerah yang mempunyai produktivitas tenaga kerja rendah ternyata juga menunjukkan rendahnya produktivitas sektor sekunder dan tersiernya. Sedangkan nilai rata-rata produktivitas sektor primer ternyata lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata produktivitas sektor sekunder dan tersier.

Perbandingan tingkat produktivitas sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Tabel 3 menunjukkan sektor sekunder mempunyai tingkat produktivitas rata-rata tertinggi, disusul sektor tersier dan paling rendah tingkat produktivitas sektor primer. Tingginya tingkat produktivitas sektor sekunder dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan mempunyai kualitas, kemampuan lebih tinggi dibandingkan sektor tersier dan sektor primer. Sungguhpun demikian terlihat adanya ketimpangan dalam tingkat produktivitas sektor sekunder antar daerah juga sangat besar, dibandingkan sektor tersier dan sektor primer, karena perbedaan dalam proses produksi di sektor sekunder, di mana di satu sisi ada yang menekankan pada kegiatan padat karya dengan menggunakan banyak tenaga kerja dengan keterampilan yang terbatas. Sedangkan di sisi lain ada yang lebih menekankan pada kegiatan padat modal dan teknologi tinggi dengan menggunakan sedikit mungkin tenaga kerja. Sehingga dapat dilihat perbedaan nilai keluaran (*output*) per tenaga kerja di sektor sekunder juga tinggi.

TABEL 3 DISKRIPSI VARIABEL PRODUKTIVITAS DAERAH

	Indikator	Minimum	Maximum	Mean	Stan Dev
Y11	Produktivitas Sektor Primer (Jutaan Rp / TK sektor primer)	27069,34855	119,6829503	3073,264988	4966,503822
Y12	Produktivitas Sektor Sekunder (Jutaan Rp / TK sektor sekunder)	7842,868528	305,458512	1483,501045	1726,759149
Y13	Produktivitas Sektor Tersier (Jutaan Rp / TK sektor tersier)	1625,359789	134,2765762	518,0245706	357,7415991
Y14	Produktivitas Tenaga Kerja (Jutaan Rp / TK)	1,351458909	0,048618571	0,281427267	0,268817393

Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Perhitungan, 2006-2010

Perbandingan tingkat produktivitas sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Tabel 3 diatas menunjukkan sektor sekunder mempunyai tingkat produktivitas rata-rata tertinggi, disusul sektor tersier dan paling rendah tingkat produktivitas sektor primer. Tingginya tingkat produktivitas sektor sekunder dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan mempunyai kualitas, kemampuan lebih tinggi dibandingkan sektor tersier dan sektor primer. Sungguhpun demikian terlihat adanya ketimpangan dalam tingkat produktivitas sektor sekunder antar daerah juga sangat besar, dibandingkan sektor tersier dan sektor primer, karena perbedaan dalam proses produksi di sektor sekunder, di mana di satu sisi ada yang menekankan pada kegiatan padat karya dengan menggunakan banyak tenaga kerja dengan keterampilan yang terbatas. Sedangkan di sisi lain

ada yang lebih menekankan pada kegiatan padat modal dan teknologi tinggi dengan menggunakan sedikit mungkin tenaga kerja. Sehingga dapat dilihat perbedaan nilai keluaran (*output*) per tenaga kerja di sektor sekunder juga tinggi.

Diskripsi variabel pembangunan wilayah dijelaskan melalui enam indikator yang diukur, yaitu pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), kemiskinan, AHH (Angka Harapan Hidup), dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Daerah yang pertumbuhan ekonominya tertinggi adalah Kabupaten Magelang (6,12%) pada tahun 2010, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Klaten (1,72%), nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi antar daerah di Jawa Tengah adalah 4,83%, terdapat 11 daerah kabupaten/kota yang mempunyai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata tersebut.

Indikator nilai PDRB per kapita tertinggi terdapat di Kota Semarang (Rp. 27.891 juta per kapita) pada tahun 2010 dan terendah di tahun yang sama adalah Rp.5.590 juta per kapita, sedangkan dari tahun 2006-2010 terendah Kabupaten Kebumen (Rp. 3.392 juta per kapita). Sementara itu, tingkat PDRB per kapita antar daerah sangat bervariasi terlihat dari perbedaan nilai minimum dan maksimumnya, serta nilai standar deviasinya. Hal ini terlihat dari kesenjangan nilai PDRB per kapita antara Kota Semarang dan Kabupaten Kebumen yang demikian besar. Selanjutnya, nilai rata-rata PDRB per kapita antar daerah di Jawa Tengah adalah Rp. 9.994 juta per kapita, di mana dari tahun 2006-2010 terdapat 4 daerah Kabupaten/Kota yang berada diatas nilai rata-rata tersebut yaitu Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Surakarta.

Indikator indeks pembangunan manusia menjadi salah satu ukuran dalam capaian kualitas hidup masyarakat. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mempunyai IPM tertinggi dari tahun 2006-2010 adalah Kota Surakarta (77,86) sedangkan terendahnya adalah Kabupaten Sragen (67,8) yang terjadi pada tahun 2006. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar daerah di Jawa Tengah berkisar antara 67,8 – 77,86, nilai rata-rata 72,63 dan 7 daerah kabupaten/kota, mempunyai nilai IPM diatas nilai rata-rata, yaitu kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kota Searang, kabupaten Magelang, Kabupaten Salatiga, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten semarang.

Indikator selanjutnya dalam mengukur pembangunan suatu daerah adalah rendahnya tingkat kemiskinan. Diskripsi data tahun 2006-2010 dari ke 15 daerah penelitian menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kota Surakarta (306.584), sedangkan terendah Kabupaten Boyolali (136.787). Sedangkan nilai rata-rata tingkat kemiskinan antar daerah di Jawa Tengah adalah 192.173,81%.

Indikator berikutnya adalah AHH. Daerah yang mempunyai angka harapan hidup dari tahun 2006-2010 tertinggi adalah Kabupaten Sragen (72,56 tahun) sedangkan terendah adalah Kabupaten Kendal (67,1 tahun). Angka Harapan Hidup (AHH) antar daerah berkisar antara 67,1 tahun –72,56 tahun, dengan besarnya nilai rata-rata harapan hidup antar daerah di Jawa Tengah adalah 70,77 tahun, dan 7 daerah Kabupaten/Kota mempunyai angka harapan hidup di bawah angka rata-rata tersebut.

TABEL 4 DISKRIPSI VARIABEL PEMBANGUNAN WILAYAH

	Indikator	Min	Max	Mean	StanDev
Y21	Pertumbuhan Ekonomi (%/tahun)	4,827282	6,12205	1,727109	0,942622
Y22	PDRB per Kapita (dalam juta Rp.)	9,944646	27,89116	3,392742	4,8023
Y23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,63347	77,86	67,8	2,59983
Y24	Kemiskinan (%)	192173,8	306584	136787	37158,92
Y25	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,77693	72,56	67,1	1,333444
Y26	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	30768,43	85710	5766	17741,38

Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Perhitungan, 2006-2010.

Indikator terakhir dari pembangunan daerah adalah karakteristik pengangguran yang terdapat di daerah. Hal tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Persentase tingkat pengangguran terbuka antar daerah berkisar antara 57,66-85,71, dengan besarnya persentase rata-rata adalah 30768,42. TPT tertinggi adalah Kota Kota Semarang dan terendah Kota Magelang pada tahun 2006.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian Identifikasi variabel menunjukkan hasil yang dipilah pada kesimpulan: Daerah mempunyai LQ yang berbeda-beda yang mengindikasikan adanya *base* keunggulan daerah masing-masing sektor. Variabel keunggulan komparatif dengan 7 indikator (LQ sektor Primer, LQ sektor sekunder, LQ sektor tersier, Indeks spesialisasi, Kepadatan Penduduk, angkatan kerja, penduduk tamat SMA menunjukkan hanya 3 indikator yang *valid* yaitu indeks spesialisasi, angkatan kerja serta penduduk tamat SMA.

Saran

Mengacu hasil kajian penelitian yang telah dilakukan maka saran serta masukan yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan, adalah: Diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperhatikan dan memperbaiki sarana dan prasarana atau faktor-faktor pendukung

yang mempengaruhi perkembangan sektor non basis, sehingga dapat menambah dan menjadikan sektor non basis sebagai sektor basis yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat yang memerlukan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi sektor-sektor di masing-masing Kabupaten /Kota sehingga bisa bekerja sama dengan pemerintah meningkatkan sektor non basis di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

REFERENSI

- Adams, N., Alden, J. and Harris, N. 2006. *“Regional Development dan Spatial Planning in an Enlarged European Union”*, Aldershot: Ashgate.
- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *“Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori”*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Barro, Robert J., and Xavier Sala-i-Martin. 1999. *“Economic Growth”*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2010. *“Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2009 Provinsi Jawa Tengah”*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2010. *“Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah: Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 2005 – 2009”*. Kerjasama Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Semarang BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2010. *“Analisa Indikator Ekonomi dan Sosial Jawa Tengah Tahun 2009”*. Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2009. *“Analisa Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Jawa Tengah Tahun 2008”*. Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2009. *“Data Ketenagakerjaan di Jawa Tengah 2008”*. Surakarta: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2009. *“Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2005 – 2008”*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Capello, R. and Nijkamp, P. 2009. *“Handbook of Regional Growth and Development Theories”*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Daryanto, A. dan Hafizrianda, Y. 2010. *“Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi”*. Bogor: IPB Press.

- Daryono Soebagiyo, 2008, "Analisis Kompetensi Unggulan daerah Pada Produk batik Tulis dan Cap di Dati II Kota Surakarta", *JEP* Vol.9, No.2 Desember 2008.
- Daryono Soebagiyo dan Darmansyah, 2010 "Stimulus Ekspor Terhadap Kinerja Perusahaan Perusahaan batik", *JEP* Vol 11 No.2 Desember 2011.
- Djakapermana, R.D. 2010. "*Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman*". Bogor: IPB Press.
- Emrousnезд.A, Parker BR, tavaros.G, 2008, "Evaluation of Research in Efficiency of Productivity, a Survey and Analysis of The First 30 Years of Shcolarly Literature in DEA", *Sicio Economics Planning Sciences*, Vol 42, (3) : 151-157
- Isard, Walter, et.al. 1998. "*Methods of Interregional and Regional Analysis*". Aldeshot: Ashgate.
- Jogiyanto, dan Abdillah W. 2009. "*Konsep dan Aplikasi Partial Least Square untuk Penelitian Empiris*". Yogyakarta: BPFPE.
- Kitson, M., Martin, R. and Tyler, P. 2004. "Regional Competitiveness: An Elusive Yet Key Concept? *Regional Studies*", 38 (9): 991 — 999.
- Kline, R.B. 2005. "*Principles and Practice of Structural Equation Modeling*". New York, NY: The Guilford Press.
- KPPOD. 2007. "*Tata Kelola Ekonomi Daerah di Indonesia 2007*". Jakarta: KPPOD-USAID-Asia Foundation.
- Krugman, Paul. 1996. "Making Sense of the Competitiveness Debate". *Oxford Review of Economic Policy*, Vol. 12, No. 3: 17 – 25.
- Porter, M.E. 2000. "Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy", *Economic Development Quarterly*. Vol. 14, No. 1, February 2000: 15 – 34.
- PPSK Bank Indonesia dan LP3E FE Unpad. 2008. "*Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramanathan, R. 2003. "*An Introduction to Data Envelopment Analysis: A Tool for Performance Measurement*". New Delhi: Sage Publications India.
- Romer, D. 2006. "*Advanced Macroeconomics*", 3rd Edition. New York: Mc.Graw-Hill.
- Rustiadi, E., Saefulhakim S. dan Panuju D.R. 2009. "*Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*". Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Sjafrizal. 2008. "*Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*". Padang: Baduose Media.
- Tarigan, Robinson. 2005. "*Perencanaan Pembangunan Wilayah*". Jakarta: Bumi Aksara.

-
- Tsoufidis, Lefteris. 2010. "*Competing Schools of Economic Thought*". Berlin: Springer Verlag.
- Wintzer, E. 2007. "*Regional Politik Und New Economic Geography: Grundlagen, Modelle, Entwicklungen*". Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
- World Bank. 2009. "*World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography*", Washington DC.